



Media Sosial Sebagai Sarana Kontrol Sosial Mahasiswa Fkip Untirta Terhadap Pemerintah Di Indonesia

Mutiara Salsabilla¹, Septi Kuntari²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: 2290230019@untirta.ac.id septikuntari@untirta.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The increasing use of social media has transformed the way students express opinions and participate in public discourse. Social media is now seen as a potential tool for exercising social control over the government. This study aims to examine the meaning of social media for students of the Faculty of Teacher Training and Education (FKIP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, as a medium of social control toward the Indonesian government. This research employs a qualitative approach with a phenomenological method to explore students' subjective experiences. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation of student activities on platforms such as Instagram, X (Twitter), TikTok, and WhatsApp. The findings show that students perceive social media as an open public space for expressing opinions and disseminating information. It also functions as a platform for participating in public discourse and monitoring government policies. Students actively engage in discussions, share information, and mobilize public attention toward social and political issues. They are also aware of ethical norms and legal regulations when expressing criticism. In addition, social media reflects the characteristics of a digital public sphere, including plurality, publicity, privacy, and legality. In conclusion, social media serves as a deliberative space that strengthens democratic participation and functions as an effective tool of social control.

Keywords: *Social media, public sphere, social control*

ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan media sosial telah mengubah cara mahasiswa dalam mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Media sosial kini dipandang sebagai alat potensial untuk menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna media sosial bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi aktivitas mahasiswa di platform seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan WhatsApp. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai media sosial sebagai ruang publik yang terbuka untuk menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana partisipasi dalam diskursus publik serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi, berbagi informasi, dan mengangkat isu sosial-politik. Mereka juga memiliki kesadaran terhadap norma etika dan aturan hukum dalam menyampaikan kritik. Selain itu, media sosial mencerminkan karakteristik ruang publik digital seperti pluralitas, publisitas, keprivatan, dan legalitas. Kesimpulannya, media sosial berperan sebagai ruang deliberatif yang memperkuat partisipasi demokratis dan menjadi alat kontrol sosial yang efektif.

Kata Kunci: Media sosial, ruang publik, kontrol sosial

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi dan komunikasi di era digital telah mengubah secara mendasar berbagai aspek kehidupan sosial, terutama dalam cara individu berinteraksi dan menyampaikan pandangan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Media sosial sebagai salah satu produk dari kemajuan teknologi digital kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta opini terhadap berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, penggunaan media sosial mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Berbagai platform seperti Instagram, Twitter (X), TikTok, dan Facebook telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai alat partisipasi publik dalam proses demokrasi, di mana masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Transformasi digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam pola interaksi sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Kehadiran media sosial seperti Instagram dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi dan pembentukan perilaku sosial. Penggunaan media sosial secara intensif telah mempengaruhi cara siswa berinteraksi, baik secara berani maupun dalam kehidupan nyata (Nurmala et al., 2022), serta turut membentuk cara mereka dalam merespons berbagai isu sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks tersebut, fenomena lambatnya respons pemerintah terhadap laporan dan aspirasi masyarakat kerap menjadi perhatian, di mana tidak sedikit permasalahan sosial baru mendapatkan perhatian setelah menjadi perbincangan luas di media sosial. Kondisi ini mencerminkan kurangnya efektivitas saluran formal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga mendorong masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai kelompok yang kritis dan aktif, untuk mencari alternatif dalam menyampaikan kritik dan tuntutan. Oleh karena itu, media sosial dimanfaatkan sebagai ruang

terbuka untuk menyuarkan berbagai permasalahan sekaligus sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah di Indonesia.

Media sosial kini menjadi bagian integral dalam kehidupan mahasiswa, terutama dalam membangun relasi sosial dan mengekspresikan identitas diri. Platform seperti Instagram memungkinkan mahasiswa untuk menampilkan identitas sosial tertentu yang terkadang berbeda dengan kehidupan nyata, sehingga memunculkan fenomena pemisahan identitas antara ruang digital dan ruang sosial langsung (Anna & Setiawan., 2024). Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial yang aktif, di mana mahasiswa dapat saling bertukar informasi, berkomunikasi, serta membangun jejaring sosial secara lebih luas (Reniati et al., 2022) Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya membentuk identitas dan relasi sosial mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang yang dinamis dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi.

Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan media sosial turut berkontribusi terhadap perubahan perilaku sosial mahasiswa, termasuk dalam hal partisipasi, respons terhadap isu sosial, serta cara menyampaikan pendapat. Aplikasi seperti TikTok, misalnya, tidak hanya memengaruhi gaya komunikasi, tetapi juga membentuk pola perilaku sosial yang lebih ekspresif dan responsif terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat (Nurmala et al., 2022). Perubahan ini mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam menyikapi berbagai isu publik yang muncul, baik melalui penyampaian opini, diskusi, maupun penyebaran informasi di ruang digital.

Selain memengaruhi perilaku sosial, media sosial juga berkaitan dengan produktivitas dan aktivitas mahasiswa, terutama dalam situasi tertentu seperti masa pandemi. Transformasi digital yang terjadi mendorong mahasiswa untuk lebih adaptif dalam memanfaatkan teknologi, baik untuk kepentingan akademik maupun sosial (Haerullah & Kudus, 2022). Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mahasiswa, termasuk dalam membentuk pola partisipasi sosial mereka.

Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang memungkinkan terjadinya interaksi, pertukaran informasi, serta pembentukan opini publik di kalangan mahasiswa. Media sosial membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai diskursus sosial, termasuk dalam menyikapi isu-isu publik yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memperkuat posisi media sosial sebagai ruang yang potensial dalam membangun kesadaran sosial sekaligus mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kehidupan sosial dan politik.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki posisi strategis dalam merespons fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui media sosial, mahasiswa tidak hanya berinteraksi secara sosial, tetapi juga mulai menunjukkan keterlibatan dalam berbagai isu publik, termasuk dalam mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah. Aktivitas seperti penyampaian opini, diskusi, hingga penyebaran informasi menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi lebih dari

sekadar media komunikasi, yaitu sebagai sarana yang memungkinkan mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bagian dari komunitas akademik juga turut memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana media sosial menjadi sarana kontrol sosial bagi mahasiswa FKIP Untirta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana mahasiswa memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai ruang interaksi sosial, tetapi juga sebagai sarana dalam menyampaikan kritik, aspirasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami makna pengalaman subjektif mahasiswa dalam menggunakan media sosial sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Subjek penelitian adalah mahasiswa FKIP yang aktif menggunakan media sosial. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa yang aktif menyampaikan opini atau terlibat dalam diskursus publik di media sosial (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan lebih menekankan pada kedalaman data (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi (Moleong, 2022). Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pemaknaan informan, observasi untuk mengamati aktivitas di media sosial, serta dokumentasi untuk melengkapi data berupa arsip atau tangkapan layar. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa media sosial dimaknai oleh mahasiswa sebagai ruang publik digital yang memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi, kritik, serta sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah. Pada bagian ini disajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dalam kerangka pembahasan:

Deskripsi data pada bagian ini disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa FKIP Untirta yang menjadi informan penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pemaknaan, serta praktik mereka dalam menggunakan media sosial sebagai bagian dari ruang publik digital. Fokus penggalian data diarahkan pada

bagaimana mahasiswa memanfaatkan media sosial, bagaimana mereka terlibat dalam diskursus publik, serta bagaimana media sosial dipahami dan digunakan sebagai sarana untuk menyuarakan kritik, mengawasi, dan memberikan tekanan terhadap pemerintah di Indonesia. Seluruh data kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Proses tersebut menghasilkan empat tema utama yang selaras dengan konsep ruang publik menurut Jürgen Habermas, yaitu pluralitas, publisitas, keprivatan, dan legalitas.

a) Pluralitas

Mahasiswa memahami media sosial sebagai ruang yang mempertemukan berbagai kelompok, komunitas, dan individu dengan latar belakang berbeda. Platform yang digunakan pun beragam, dan setiap platform digunakan untuk tujuan yang berbeda sehingga mencerminkan heterogenitas ruang publik digital. YTS menjelaskan bahwa ia *"menggunakan TikTok untuk mencari informasi, Twitter untuk mengkritik, dan Instagram untuk personal branding"* (Wawancara informan YTS). Sementara itu, RPH melihat media sosial sebagai tempat di mana masyarakat *"berinteraksi, mencari informasi, dan membentuk opini pro dan kontra"* (Wawancara informan RPH)

Pluralitas ini juga terlihat dari cara mahasiswa memposisikan diri dalam komunitas digital. Beberapa di antaranya memilih menggunakan akun anonim untuk dapat lebih bebas bersuara tanpa tekanan sosial. MF mengaku bahwa ia cenderung lebih bebas ketika berpendapat menggunakan akun anonim karena *"lebih aman dari doxxing dan jejak digital"* (Wawancara informan MF).

IDL, yang aktif berdiskusi di platform X, menyatakan bahwa keberagaman pengguna membuat ruang digital ramai dan dinamis: *"karena saya chronically online di X, saya melihat orang dari latar yang beda-beda membentuk opininya masing-masing"* (Wawancara informan IDL).

Temuan ini menunjukkan bahwa pluralitas pengalaman, preferensi platform, dan cara mahasiswa mengekspresikan diri membentuk dasar bagi keberlangsungan ruang publik digital.

b) Publisitas

Mahasiswa melihat media sosial sebagai medium utama penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Ruang ini dipahami sebagai arena diskusi terbuka di mana gagasan saling bersinggungan. RPH menggambarkan ruang publik digital sebagai *"ruangan yang banyak gagasan, saling melebur, dan tempat berdiskusi yang bebas"* (Wawancara informan RPH). Mahasiswa menilai bahwa media sosial menyediakan fasilitas untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi arah diskusi publik. YTS merasa lebih nyaman berdiskusi di media sosial karena *"lebih banyak pendapat orang-orang yang muncul dan diskusi terasa lebih nyaman"* (Wawancara informan YTS).

Akan tetapi, kualitas publisitas juga dipengaruhi oleh algoritma dan buzzer. MF menjelaskan bahwa *"algoritma mengatur apa yang kita lihat, ditambah intervensi buzzer dan regulasi platform yang mempengaruhi kebebasan berpendapat"* (Wawancara informan MF). IDL mengungkapkan bahwa hambatan diskusi

sering muncul ketika berhadapan dengan pengguna yang *“tone deaf (sikap ketidakpekaan) terhadap isu tertentu sehingga membuat malas lanjut diskusi”* (Wawancara informan IDL). Dengan demikian, publisitas di media sosial bersifat terbuka tetapi tidak sepenuhnya bebas, karena arah informasi dipengaruhi oleh struktur platform, budaya pengguna, dan dinamika politik digital, di mana salah satu bentuk publisitas yang dilakukan oleh informan adalah melalui poster digital yang disebarluaskan di media sosial serta dibagikan ulang (*repost*) sebagai upaya memperluas jangkauan informasi kepada khalayak yang lebih luas.



Gambar 2: Tampilan *feed* media sosial (Instagram) untuk publikasi isu

c) Keprivatan

Dalam ruang publik digital, mahasiswa menggunakan media sosial untuk membangun dan menguji opini pribadi sebelum membawanya ke diskursus publik. Proses pembentukan opini ini berlangsung melalui refleksi individual berbasis data, moralitas, dan identitas sebagai mahasiswa. RPH menyatakan bahwa dorongan untuk terlibat berasal dari kesadaran personal: *“kalau tidak saya siapa lagi, ini bentuk kepedulian”* (Wawancara informan RPH). Hal ini mencerminkan dimensi keprivatan sebagai dasar kemunculan opini publik. MF menegaskan bahwa sebagai mahasiswa ia merasa memiliki *“tanggung jawab moral untuk tidak acuh terhadap isu sosial dan membawa kualitas diskusi berbasis data”* (Wawancara informan MF). IDL menyampaikan bahwa mahasiswa *“sudah sepaket sama kata diskusi, kalau bukan mahasiswa yang menciptakan diskusi rasional, siapa lagi?”* (Wawancara informan IDL).

Keterlibatan mahasiswa biasanya muncul setelah mereka menilai relevansi suatu isu dengan nilai, moral, atau kepedulian pribadi. YTS misalnya

terlibat ketika isu “*dirasa perlu dikawal agar naik di media sosial*” (Wawancara informan YTS). Temuan ini menunjukkan bahwa keprivatan, dalam bentuk refleksi moral, kesadaran kritis, dan pembentukan opini pribadi memengaruhi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam diskursus publik digital.



Gambar 3: Akun anonim sebagai bentuk keprivatan dalam ruang publik digital

d) Legalitas

Mahasiswa menilai bahwa media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintah, namun penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari batasan legal dan norma demokratis. RPH menegaskan bahwa isu yang diperjuangkan di media sosial “*bisa naik dan mendorong pemerintah bertindak cepat ketika dibahas terus-menerus oleh publik*” (Wawancara informan RPH). Fenomena “*no viral no justice*” juga muncul kuat. YTS menyebut, “*memang viral dulu baru diurus*” (Wawancara informan YTS). Sementara Y menyoroti bagaimana viralitas meningkatkan tekanan politik: “*pemerintah akan cuek kalau isu tidak jadi atensi publik*” (Wawancara informan Y).

Secara lebih konseptual, MF menjelaskan bahwa kritik mahasiswa di media sosial “*sangat mampu memberikan tekanan karena pemerintah membutuhkan legitimasi politik*” (Wawancara informan MF). Kritik digital dianggap sebagai mekanisme demokratis yang memaksa negara merespons ruang publik. Namun, mahasiswa tetap mempertimbangkan aspek legal. IDL menegaskan bahwa kritik harus “*berdasarkan data dan hati-hati agar tidak kena UU ITE*” (Wawancara informan IDL). Mahasiswa sadar bahwa kebebasan berpendapat selalu berdampingan dengan ancaman regulasi, buzzer, dan represi. Dengan demikian, legalitas menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana mahasiswa membentuk narasi, menyampaikan kritik, dan menegosiasikan posisi mereka dalam arena politik digital.

Berdasarkan keseluruhan temuan mengenai pluralitas, publisitas, keprivatan, dan legalitas dalam ruang publik digital, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FKIP

Untirta memaknai media sosial sebagai arena strategis yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah secara lebih efektif, cepat, dan luas. Media sosial dipahami bukan sekadar medium komunikasi, tetapi sebagai ruang publik digital yang mempertemukan beragam suara, memperkuat penyebaran informasi, serta membuka peluang partisipasi politik yang sebelumnya terbatas pada ruang tatap muka.

Pluralitas pengguna dan platform memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memilih medium yang paling sesuai dengan tujuan ekspresi mereka – baik untuk mencari informasi, menyampaikan kritik, membangun solidaritas, maupun menggalang dukungan publik. Publisitas media sosial memungkinkan mahasiswa memengaruhi arus diskusi publik, meskipun mereka tetap menyadari adanya dinamika algoritma, buzzer, serta ketimpangan budaya digital yang memengaruhi kualitas diskursus. Pada saat yang sama, keprivatan menjadi fondasi pembentukan opini kritis, di mana refleksi moral, kesadaran akademik, dan identitas sebagai mahasiswa mendorong mereka untuk terlibat dalam isu-isu yang dianggap penting untuk diawasi. Dimensi legalitas kemudian mengarahkan mahasiswa untuk mengelola kritik secara lebih hati-hati, mempertimbangkan aspek regulasi, legitimasi politik, serta konsekuensi dari viralitas isu.

Secara keseluruhan, mahasiswa FKIP Untirta memaknai media sosial sebagai alat kontrol sosial yang bersifat deliberatif, yaitu alat yang memungkinkan mereka membangun argumentasi berbasis data, memobilisasi perhatian publik, dan memberikan tekanan moral serta politik kepada pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan (Semadi, 2024)) yang menyatakan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam mendukung proses penegakan hukum melalui penyebaran informasi dan pembentukan opini publik yang dapat mendorong respons institusi negara. Selain itu, peran mahasiswa sebagai agen perubahan juga memperkuat posisi mereka dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial dan mengawal kebijakan publik (Syaiful, 2023). Efektivitas media sosial sebagai alat kontrol sosial, menurut pandangan mahasiswa, terletak pada kemampuannya menciptakan ruang dialog horizontal yang tidak sepenuhnya dapat dihalangi oleh batas-batas ruang fisik maupun hirarki politik. Dengan memanfaatkan dinamika digital, mahasiswa berupaya menjaga agar kebijakan publik tetap diawasi, dipertanyakan, dan dikritisi melalui keterlibatan aktif dalam percakapan publik.

Fenomena ini juga diperkuat oleh adanya praktik *“no viral no justice”* yang menunjukkan bahwa perhatian publik di media sosial sering kali menjadi faktor penentu dalam percepatan respons pemerintah terhadap suatu isu. Selain itu, hubungan antara media dan pemerintah dalam fungsi kontrol sosial menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam mengawasi serta menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik secara terbuka (Ghassani & Sukowati, 2016). Dengan demikian, media sosial bagi mahasiswa FKIP Untirta bukan hanya wadah ekspresi, tetapi juga instrumen demokratis yang memungkinkan mereka berkontribusi pada proses pembentukan opini publik dan penegakan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bernegara.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memaknai media sosial sebagai ruang publik digital yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi, membangun diskursus, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Melalui karakteristik pluralitas, publisitas, keprivatan, dan legalitas, media sosial memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Mahasiswa tidak hanya memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang deliberatif untuk membentuk opini berbasis data, menyebarkan informasi, serta memobilisasi perhatian publik terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, efektivitas media sosial sebagai alat kontrol sosial terletak pada kemampuannya menciptakan tekanan publik melalui viralitas isu, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan seperti algoritma, buzzer, serta batasan regulasi hukum. Mahasiswa menunjukkan kesadaran kritis dalam menggunakan media sosial secara etis dan legal, sehingga kritik yang disampaikan tetap berada dalam koridor demokrasi. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai instrumen demokratis yang memperkuat partisipasi mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mendorong terciptanya ruang publik yang lebih terbuka dan responsif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen, para informan mahasiswa FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa, serta ucapan terima kasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- A Anna, & R Setiawan. (2024). *Pemisahan Identitas Sosial Akun Instagram Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Untirta*.
- Dwi Nurmala, M., Afrizal, S., Umar Syarif Hadi Wibowo. (2022). *Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Mahasiswa*. Retrieved <http://www>.
- Ghassani, & Sukowati. (2016). *BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL*. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>
- Haerullah, F. A., & Kudus, W. A. (2022). TRANSFORMASI PRODUKTIVITAS MAHASISWA PENDIDIKAN SOSIOLOGI UNTIRTA DI MASA PANDEMI. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 228. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54391>
- Reniaty, I., Agustin, R., Suryani, D., Risdiana, R., Trisnawati, O., & Abdul Kudus, W. (n.d.). Penggunaan Instagram Sebagai Media Interaksi Sosial Pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019 Universitas Sultan Ageng

- Tirtayasa (Studi Kasus Ragam Sosial Budaya Perspektif dan Konteks Psikologi Sosial). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Desember, 2022(14), 363–370. Retrieved <http://ejournal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>
- Semadi, P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Maret 2024 P Indonesian Journal of Law Research*, 2(1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Syaiful, A. (2023). Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Masyarakat. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(1), 29–34. <https://doi.org/10.53621/jider.v3i1.102>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Creswell, J. W. ., & Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative inquiry and research design : Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. . (2022). *Metodologi penelitian kualitatif (reguler)*. PT Remaja Rosdakarya.